

IMPLEMENTASI PROGRAM KOSTRATANI DI WILAYAH KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN GUNUNGPATI

Implementation Of Kostratani In Gunungpati District

Mumtaz Ahnaf Bekti^{1*}, Siwi Gayatri¹, Agus Subhan Prasetyo¹

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Indonesia, 1269

*Email : mumtaz.ahnaf@gmail.com

Naskah diterima: 29/08/2022, direvisi: 19/12/2022, disetujui: 08/01/2023

ABSTRAK

Program Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani) hadir sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Program Kostratani hadir di Kota Semarang memulai *pilot project* di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Gunungpati. BPP Kecamatan Gunungpati ditunjuk menjadi *pilot project* sebab merupakan salah satu BPP di Kota Semarang yang memenuhi kriteria dari klasifikasi BPP Kostratani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mendeskripsikan implementasi dan permasalahan Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati. Penelitian dilakukan pada 15 Agustus - 23 Oktober 2021 menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengambilan informan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria informan yang terlibat langsung dalam implementasi Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati, sedangkan informan lainnya diperoleh melalui teknik *snowball sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis model tematik oleh Braun & Clarke meliputi mengembangkan kode manual, menguji reabilitas kode manual, meringkas data dan mendeskripsikan tema, menerapkan kode untuk pengembangan, menghubungkan kode untuk memperoleh tema, memperkuat dan mengabsahkan kode, menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1)

Pelaksanaan program kostratani sudah sesuai dengan juknis kostratani yang disusun oleh Kementerian Pertanian, walaupun masih terdapat permasalahan teknik dan non-teknis pada pelaksanaannya. 2) Permasalahan implementasi program kostratani meliputi pelaksanaan dan sumberdaya pendukung program kostratani. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan optimalisasi kinerja BPP dengan membuat prosedur yang lebih sederhana dan mudah untuk diaplikasikan oleh pelaksana kebijakan

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kostratani, Permasalahan, Transformasi

ABSTRACT

The Agricultural Development Strategy Command Program (Kostratani) is of government effort to achieve national food sovereignty. The Kostrarani program is lauch in Semarang City by starting a pilot project at the Agricultural Extension Center (BPP) in Gunungpati District. BPP Gunungpati District was appointed to be a pilot project because it is one of the BPP in Semarang City that meets the criteria of the Kostratani BPP classification. The research was conducted on August 15 – October 23, 2021, using qualitative descriptive research. Informants were taken using a purposive sampling method with the criteria of informants who were directly involved in the implementation process of the Kostratani Program at BPP Gunungpati District while other informants were obtained through the snowball sampling. Analysis of the data used is the analysis of the thematic by Braun & Clarke which includes developing manual codes, testing the reliability of manual codes, summarizing data and describing themes, applying code for development, linking code to obtain themes, strengthening and validating codes, and drawing conclusions. The results of this study are 1) The implementation of the boarding house program is by the technical guidelines for the boarding house compiled by the Ministry of Agriculture, although there are still technical and non-technical problems in its implementation. 2) Problems with the implementation of the boarding house program include the implementation and supporting resources for the boarding school program. Suggestions that can be given are to optimize the performance of BPP by making simpler and easier procedures to be applied by policy implementers.

Keywords : Implementation, Kostratani, Policy, Problems, Transformation

PENDAHULUAN

Isu pertanian di Indonesia selalu menjadi topik pembahasan yang menarik untuk berbagai elemen masyarakat dari berbagai tingkat sosial yang didalamnya meliputi akademisi, pengusaha, pemerintah hingga kelompok masyarakat. Hal ini dikarenakan pembangunan pertanian sangat erat kaitannya dengan pangan. Pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia ini menjadi tolak ukur untuk kemajuan suatu bangsa. Tahun 2019 Kementerian Pertanian menyusun program prioritas yang meliputi kegiatan (1) memperbaiki data pangan, termasuk kejelasan dan keserasian data suatu lahan dan komoditas yang akan dipanen dari tingkat kecamatan hingga pusat agar dapat dimonitor, (2) memanfaatkan teknologi sebagai pendorong kemajuan sektor pertanian melalui penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dan pemanfaatan citra satelit, (3) pengendalian pertanian melalui De-Birokrasi yang akan dipadukan dengan pemanfaatan Informasi dan teknologi yang akan dipusatkan ditiap Kecamatan (Kementan, 2020). Program prioritas ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan pada sektor pertanian secara efektif. Program prioritas ini kemudian diberikan nama Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani). Peluncuran Program Kostratani ini ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) ditingkat kecamatan. Target jangka pendek dari Program Kostratani adalah untuk memenuhi sarana, prasarana, kelembagaan, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dan penyelenggaraan pertanian di kecamatan berbasis teknologi informasi.

Balai penyuluhan pertanian sebagai pengimplementasi Program Kostratani memiliki fungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat petani. Penyuluh memiliki peran untuk menyampaikan informasi secara *bottom-up*, sehingga pendekatan penyuluhan dapat dilakukan dengan instruktif dan meningkatkan partisipasi dari seluruh komponen yang terlibat (Dayat, 2017). Penyampaian informasi ini perlu dilakukan secara instan dan terintegrasi melalui satu gerbang informasi yaitu *Agriculture War Room* (AWR). Melalui Kostratani pemerintah melakukan upaya perbaikan secara progresif dengan harapan tercapainya keserasian data dan dapat diakses secara *real-time* melalui AWR.

Transformasi BPP yang dilaksanakan di Kota Semarang dengan melakukan *pilot project*. Wilayah yang akan menjadi *pioneer* adalah Kecamatan Gunungpati yang secara statistik memiliki berbagai varietas komoditas dari produk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, Kecamatan Gunungpati juga memiliki kelompok masyarakat yang berfokus pada pengembangan masyarakat maupun pertanian yang jumlahnya 92 kelompok. Peran aktif dari anggota kelompok ini mendorong semangat penyuluh di BPP Gunungpati untuk turut berproses dalam optimalisasi fungsi dan peran BPP serta mendorong semangat penyuluh untuk bertransformasi. Selain itu dalam pengimplementasiannya tentu akan ada dinamika permasalahan seperti dalam penyerapan sumber daya manusia dan pengalokasian anggaran, sehingga dalam kompleksitas masalah Program Kostratani ini perlu adanya keterlibatan dari banyak komponen salah satunya melalui penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka perlu dilakukan penelitian yang membahas seputar implementasi Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, sehingga perlu partisipasi dalam berbagai bentuk dari segala elemen masyarakat baik itu akademisi maupun swadaya masyarakat sekitar serta eksplorasi lebih dalam mengenai Program Kostratani. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kostratani dalam mencapai target jangka pendeknya serta dapat memberikan saran untuk kemajuan dan perbaikan Program Kostratani di Indonesia khususnya di BPP Kecamatan Gunungpati.

METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan pada 15 Agustus - 23 Oktober 2021 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan BPP Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan di Kota Semarang yang dijadikan *pilot project* BPP Kostratani. Metode penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. *Key informant* dipilih secara *purposive* dengan melihat peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada *key informant*. Pemilihan *key informant* berdasarkan informan yang berkaitan

dengan Program Kostratani yaitu Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang. Sedangkan 6 informan lainnya diperoleh melalui teknik *snowball sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis tematik dari Braun dan Clarke (2006) yang meliputi mengembangkan kode manual, menguji reabilitas kode manual, meringkas data dan mendeskripsikan tema, menerapkan kode untuk pengembangan, menghubungkan kode untuk memperoleh tema, memperkuat dan mengabsahkan kode, menarik kesimpulan. Pada pembahasan penelitian ini digunakan model implementasi Merille S. Grindle (1980) yang meliputi pelaksana program, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, pengambilan keputusan, dan sumberdaya yang dilibatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kostratani di Wilayah Kerja BPP Kecamatan Gunungpati

Implementasi Program Kostratani di Kecamatan Gunungpati dilaksanakan pada tahun 2020. Implementasi program ini dilakukan dengan mengikuti acuan kebijakan dari Kementerian Pertanian mengenai Program Pembangunan Pertanian. Program pembangunan pertanian dalam lingkup kecil yaitu tingkat kecamatan meliputi banyak hal seperti pengoptimalan dan peningkatan fungsi penyuluh serta pemenuhan fasilitas pendukung pertanian. Pembangunan pertanian di wilayah kecamatan Gunungpati memiliki fokus pada pengoptimalan untuk mengefisienkan kelompok masyarakat maupun lembaga masyarakat yang berfokus pada sektor pertanian dan peternakan. Hal ini diupayakan agar masing-masing kelompok menjadi mandiri dari berbagai aspek usahatani dari hulu hingga hilir. Pembangunan pertanian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan para petani juga meningkatkan pendapatan nasional melalui ekspor produk hasil pertanian olahan maupun mentah. Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan fungsi dan peran penyuluh.

Pembangunan pertanian di Kecamatan Gunungpati tidak lepas dari peran BPP yang bersinergi dengan *Stakeholder* maupun pemangku kebijakan lainnya di

Kecamatan Gunungpati serta di Kota Semarang. Peran BPP Kecamatan Gunungpati salah satunya adalah pusat gerakan pembangunan pertanian dengan menerima dan memberikan usulan agar pembangunan pertanian di tingkat kecamatan selaras dengan kebijakan pemerintah mengenai pembangunan pertanian. Kebijakan pertanian yang disusun merupakan kebijakan yang berangkat dari usulan masyarakat yang dikumpulkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Berbagai usulan yang disampaikan kemudian memperoleh luaran berupa program pembangunan pertanian yang tidak hanya dilakukan di Kecamatan Gunungpati. Salah satu program di bidang tanaman hortikultural yang dilakukan saat ini adalah Program IP400. Program IP400 merupakan program *support* berupa benih padi dan pupuk agar dapat meningkatkan produktivitas komoditas padi. Kemudian program di bidang hortikultural yaitu pengembangan kawasan durian dan kelengkeng dengan dukungan bibit 1000 batang, lalu pengembangan kawasan tanaman obat keluarga (TOGA) yaitu dengan dukungan 1700 bibit kencur dan jahe yang dianggarkan dari APBD Kota Semarang. Kemudian program untuk bidang peternakan yaitu dukungan untuk produksi hasil peternakan melalui Penguatan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dengan pemberian bibit hijauan, lalu terdapat dukungan untuk pakan tambahan atau pakan konsentrat yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada kegiatan untuk pengobatan massal hewan ternak yang dianggarkan 2-3 kali dalam setahun oleh Dinas Kota Semarang. Seluruh kegiatan tersebut merupakan agenda program pertanian berkelanjutan di Kecamatan Gunungpati

Sosialisasi Program Kostratani di Kecamatan Gunungpati

Sosialisasi merupakan salah satu proses rangkaian dari implementasi Program Kostratani di Wilayah Kerja BPP Kecamatan Gunungpati. Pelaksanaan sosialisasi Program Kostratani dilakukan secara *online* pada 29 November 2019 dengan materi pengenalan Program Kostratani yang meliputi rangkaian agenda, tujuan jangka pendek program, penentuan lokasi *pilot project* dari 400 daerah yang ditunjuk. Sosialisasi Program Kostratani dihadiri 125 peserta yang

didalamnya meliputi penyuluh pertanian, dinas pertanian, penyuluh swadaya dan perwakilan kelompok tani.

Agenda sosialisasi dilakukan dengan membahas beberapa pokok bahasan yaitu substansi atau isi mengenai Program Kostratani dan rangkaian model percontohan Program Kostratani setelah penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penyesuaian rangkaian kegiatan proses Program Kostratani di Indonesia. Isi atau substansi dari sosialisasi ini merupakan unsur penting dalam proses sosialisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Damsar (2011) yang menyatakan bahwa sosialisasi dalam konteks kebijakan publik harus memiliki unsur penyebarluasan informasi mengenai isi atau substansi dari kebijakan yang telah disusun. Materi sosialisasi yang diberikan merupakan penyesuaian Program Kostratani di tengah kondisi pandemi Covid. Penyesuaian ini ditunjukkan pada modul Jurnal Teknis (Juknis) "Agenda Kegiatan Kostratani 2020 (Pasca Pemotongan Anggaran)", artinya pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan acuan anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat.

Modul Juknis ini membahas mengenai agenda kegiatan Program Kostratani yang meliputi 1) Pembinaan PPL, petani melalui Mentan Sapa Petani dan Penyuluh, Ngobrol Asik (Ngobras), Bertani *On-Cloud*, dan *Millenial Agriculture Forum*; 2) Pembentukan Model BPP Kostratani berbasis IT. Agenda ini merupakan agenda pokok pada proses model percontohan BPP Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati. Modul ini berisi target yang diharapkan tercapai pada tahun pertama pelaksanaan Program Kostratani di wilayah yang menjadi *pilot project* BPP Kostratani.

Pelaksanaan Program Kostratani

Implementasi Program Kostratani di Wilayah Kerja BPP Kecamatan Gunungpati dilakukan oleh dua lembaga inti yakni Dinas Pertanian Kota Semarang dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunungpati. Program Kostratani merupakan program Kementerian Pertanian yang baru saja launching pada tahun 2019. Namun kondisi pandemi Covid-19 membuat agenda Program Kostratani tertunda hingga tahun 2020. Tepat pada bulan November 2019 Kementerian Pertanian melalui perwakilannya melakukan sosialisasi Program

Kostratani yang dihadiri oleh Dinas Pertanian Kota Semarang, Penyuluh Pertanian, Petani dan *Stakeholder* terkait lainnya.

Pelaksana Program

Pelaksana program merupakan pihak yang menjalankan program yang menjadi penggerak untuk mencapai keberhasilan dan keberlangsungan implementasi suatu kebijakan. Pelaksana kebijakan tidak hanya dilakukan oleh satu komponen saja melainkan memerlukan keterlibatan berbagai komponen dalam pelaksanaan kebijakan. Sinergitas diperlukan sebagai bentuk kerja sama antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mewujudkan kegiatan yang efisien. Pelaksana dalam Program Kostratani ini disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksana Program dalam Pelaksanaan Program Kostratani

No	Pelaksana	Kegiatan
1.	Penyuluh Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pendampingan penerapan teknologi - Menyusun program untuk mendukung pencapaian target produksi pangan - Menyusun dan menyebarkan informasi - Melakukan supervisi kegiatan penyuluh pendampingan - Menghimpun data pertanian secara berkala
2.	Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan - Mensinergikan pelaksanaan penyuluhan di kecamatan dengan dinas lainnya - Mengusulkan anggaran penyuluhan - Merencanakan dan menetapkan target pembangunan pertanian
3.	UPTD	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan sasaran areal luas tanam komoditas pangan - Mengkompilasi usulan RDKK kelompok tani - Mengkoordinasikan pengawasan distribusi bantuan
4.	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah - Memfasilitasi pengembangan pos penyuluhan

Sumber : Pedoman Operasional Program Kostratani, (2019).

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa setiap pelaksana memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendorong keberhasilan

pengimplementasian Program Kostratani di wilayah kerja BPP Kecamatan Gunungpati. Tanggung jawab dan peran ini saling berhubungan satu sama lain agar dapat mewujudkan cita-cita Program Kostratani.

Tabel 2. Indikator Kinerja Program Kostratani

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kostratani	Capaian
1.	Identifikasi lokasi BPP	Diperoleh daftar lokasi BPP yang siap dijadikan <i>pilot project</i> Program Kostratani berdasarkan keaktifan dan potensi yang sudah ditentukan klasifikasinya	Calon lokasi untuk <i>pilot project</i> Program Kostratani diperoleh dan terseleksi lalu ditunjuk BPP Kec. Gunungpati sebagai <i>pilot project</i> .
2.	Sosialisasi Kostratani	Penyuluh, Petani, Camat, Dinas Pertanian memahami maksud, tujuan dan proses pelaksanaan dari Program Kostratani	Sosialisasi telah dilaksanakan secara <i>online</i> dan dihadiri oleh seluruh penyuluh dan Dinas Pertanian se-Indonesia.
3.	Pelatihan IT dan manajemen data	Penyuluh memahami IT yang disediakan untuk kelangsungan Program Kostratani seperti mengoperasikan computer dan software	Pelatihan telah dilakukan 2 kali dalam 1 periode namun, perlu ditingkatkan monitoring lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dalam pemanfaatan fasilitas IT yang disediakan
4.	Pelatihan <i>updating</i>	Penyuluh memahami langkah-langkah <i>updating</i> data termasuk mengganti, menambah maupun menghapus data	Penyuluh memahami namun sedikit kesulitan dalam memperoleh data sehingga <i>updating</i> data pertanian menjadi terhambat.
5.	Pelatihan aplikasi pelaporan program utama	Penyuluh memahami aplikasi pelaporan mengenai cara penggunaan, data yang dibutuhkan dan submit data	Penyuluh memahami aplikasi pelaporan yang terbaru namun, kesulitan akibat banyaknya aplikasi pelaporan yang harus diinput dalam waktu yang bersamaan.

Sumber: Data Primer (diolah), 2021.

Pelaksanaan Program Kostratani di Wilayah Kerja BPP Kecamatan Gunungpati dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang sudah disusun. Tahapan ini dilakukan berdasarkan tujuan jangka pendek program yaitu 1) terbentuknya 100 kelembagaan Kostratani berbasis IT, 2) terbentuknya kelembagaan Kostratani yang melibatkan instansi pusat, provinsi, kota/kabupaten dan kecamatan, 3) Beroperasinya Kostratani mendukung kebijakan dan program pembangunan pertanian.

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Kostratani masih dalam tahap *pilot project* yang didalamnya masih memiliki tahapan yang berupa bimbingan teknis (BIMTEK) untuk keberlangsung Program Kostratani. Diharapkan itu dengan adanya BIMTEK penyuluh di BPP Kecamatan Gunungpati menjadi paham dan proses pelaksanaan program.

Tipe Manfaat

Suatu kebijakan yang dibentuk dan didesain oleh pemerintah harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan memiliki dampak yang positif terhadap sasaran program. Semakin bermanfaat dampak yang diberikan dari kebijakan yang dibentuk maka akan semakin mudah dalam proses pelaksanaannya. Implementasi Program Kostratani perlu adanya kegiatan yang jelas dan konkret serta dapat memberikan dampak maupun manfaat yang nyata. Rangkaian kegiatan beserta manfaatnya dapat dilihat pada Tabel 3 .

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas penyuluh lapangan (PPL) BPP wilayah kerja Kecamatan Gunungpati, manfaat dari Program Kostratani adalah meningkatkan pengetahuan PPL terhadap data, yang artinya sebelum hadirnya program ini data pertanian masih dalam kondisi data yang belum *reliable*, namun setelah adanya Program Kostratani, PPL dituntut untuk melakukan *update* data pertanian secara berkala, yang meliputi laporan tanam, panen, distribusi pupuk, anggota kelompok serta titik koordinat lahan pertanian. Laporan ini nantinya akan di update di website Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan E-RDKK, kemudian akan dijadikan laporan data administrasi di tingkat nasional. sehingga data BPP terkait laporan pertanian ini menjadi output adanya fungsi Program Kostratani.

Tabel 3. Manfaat Rangkaian Kegiatan dalam Program Kostratani

No	Kegiatan	Manfaat
1.	Sosialisasi	Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan manfaat berupa informasi mengenai maksud, tujuan dan proses pelaksanaan Program Kostratani
2.	Pelatihan IT	Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi SDM BPP dalam menggunakan fasilitas IT berupa hardware maupun software
3.	Pelatihan Updating data	Kegiatan ini ditujukan menambah informasi mengenai update format data sesuai dengan format baru yang tertera pada sistem
4.	Pelatihan aplikasi pelaporan Program Kostratani	Kegiatan ini ditujukan memberikan informasi mengenai cara penggunaan aplikasi serta paham dengan metode input dan submit data

Sumber: Data Primer (diolah), 2021.

Manfaat yang diberikan dengan adanya Program Kostratani selain manfaat dari rangkaian teknis pelaksanaan program juga memberikan manfaat pada peningkatan dan pengoptimalan fungsi pusat data dan informasi. BPP sebagai Pusat data dan informasi sebelum hadirnya Program Kostratani berada dalam kondisi yang dimana sistem integrasi data kecamatan dengan data nasional tidak terdukung dalam satu pintu data, setelah adanya Program Kostratani data dari E-RDCK dan Simluhtan dapat terintegrasi dan melakukan filtrasi pada data yang ganda maupun data yang rancu, filtrasi data dilakukan dengan sistem atau software dari Program Kostratani. Sistem integrasi data pertanian dilakukan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam merumuskan keputusan mengenai kebijakan atau program pembangunan pertanian lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahardi (2020) yang menyatakan bahwa problematika untuk memperoleh data yang berkualitas dalam lingkup pemerintahan adalah seringkali terdapat data yang berbeda meskipun data dan tipe sejenis namun berbeda sumber berbeda pula nilai datanya, kondisi ini menjadi alasan integrasi

data dilakukan untuk menjawab kebingungan masyarakat dalam memperoleh data yang *reliable* dan berkualitas untuk dipublikasikan.

Manfaat lainnya yang dapat dirasakan oleh petugas BPP di Kecamatan Gunungpati adalah adanya peningkatan perhatian dari pemerintah pusat terkait pemenuhan fasilitas sarana-prasarana. Pemenuhan fasilitas sarana prasarana ini dilakukan untuk meningkatkan peran penyuluh khususnya pada fungsi pusat data dan informasi. Program Kostratani dilaksanakan dengan tujuan untuk digitalisasi BPP sehingga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah merupakan fasilitas pendukung untuk digitalisasi.

Derajat Perubahan yang diharapkan

Derajat perubahan yang diharapkan merupakan salah satu dari Indikator isi kebijakan (*content of policy*) dari kebijakan Program Kostratani. Berdasarkan rencana kerja Program Kostratani yang dibentuk kementerian pertanian, harapan yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatkan peran Pimpinan Daerah dalam pembangunan pertanian hingga terbentuknya sinergitas, 2) meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan PPL, 3) Digitalisasi kegiatan pertanian, 4) adanya kesatuan data pertanian nasional, dan 5) adanya komando pertanian yang berbasis IT di tingkat Kecamatan.

Program Kostratani diharapkan dapat meningkatkan peran dari pimpinan daerah dalam mendukung pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Pimpinan daerah merupakan posisi strategis dimana pimpinan daerah dapat melakukan intervensi terhadap anggotanya untuk melakukan inisiatif dalam penentuan program pembangunan pertanian. Melalui peningkatan peran dari pimpinan daerah maka akan terbentuk sinergitas antar *Stakeholder*. Hal ini sesuai dengan pendapat Pramono (2019) yang menyatakan bahwa melalui sinergitas antar *Stakeholder* akan memberikan dampak sebuah luaran yang lebih baik dan lebih besar ketika suatu program dibangun secara baik dan bersama sama antar *Stakeholder*.

Perubahan yang diharapkan berikutnya adalah meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian. Perubahan ini dilakukan oleh Menteri Pertanian melalui upaya pencerdasan dengan kelas-kelas online

yang dilakukan melalui agenda Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) dan “Ngobrol Asik”. Agenda ini dilakukan secara rutin guna untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan petani dan penyuluh. Hal ini sesuai dengan pendapat Nuryati (2020) yang menyatakan bahwa diskusi dengan para penyuluh pertanian di seluruh Indonesia dalam acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) dan Ngobrol Asik (Ngobras) Penyuluhan melalui acara Video Conference yang dilakukan secara rutin oleh Pusat Penyuluhan Pertanian diperoleh informasi bahwa terlalu banyak aplikasi pelaporan pembangunan pertanian yang harus diinput datanya oleh para penyuluh pertanian di BPP yang isinya sebagian besar sama dan terkait dengan data petani yang ada di dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Digitalisasi kegiatan pertanian merupakan harapan yang ingin diwujudkan melalui Program Kostratani. Melalui Program Kostratani data yang akan dipublikasikan untuk program kartu tani akan menjadi satu pintu data, sehingga data akan terintegrasi dalam satu sumber data. Hal ini sesuai dengan pendapat Abiwodo (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi pertanian akan memberikan manfaat bagi petani untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian serta akan tepat sasaran dalam penentuan program pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan menuju ketahanan nasional.

Harapan berikutnya adalah Komando Pertanian berbasis IT di tingkat Kecamatan. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian saat ini adalah melalui Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis IT. Melalui komando pertanian berbasis IT ini diharapkan penyuluh dapat menyampaikan inovasi teknologi kepada masyarakat petani sehingga dapat membentuk sebuah desa yang mandiri, baik dan kuat. Peran BPP menjadi penting dan strategis yaitu menjadi pusat gerakan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Setiana (2021) yang menyatakan bahwa penyuluh di BPP mempunyai peran strategis untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, menyeleraskan kegiatan pembangunan pertanian pada wilayah kerja penyuluhan pertanian di kecamatan dengan pihak terkait dengan melengkapi prasarana dan sarana penyuluhan, meningkatkan pelayanan kepada petani dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan

penyuluh pertanian baik aspek manajerial maupun *socio-cultural* serta menguasai keterampilan dan teknologi informasi komunikasi.

Program Kostratani sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian masih belum dapat dirasakan secara signifikan oleh para petani maupun peternak selaku pelaku utama dari proses agribisnis. Karena Program Kostratani masih merupakan program baru sehingga tidak mempengaruhi hasil yang diperoleh petani, adanya penggunaan teknologi mesin dalam proses produksi hasil pertanian telah dilakukan sebelum adanya Program Kostratani. Perubahan yang dilakukan melalui Program Kostratani adalah adanya digitalisasi data pertanian yang terbuka untuk publik, ketepatan data sesuai dengan kondisi lapang *in real-time* serta perubahan BPP yang bertransformasi menjadi BPP Kostratani.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan beberapa alternatif dalam pemecahan masalah, yang mana secara hakikat pengambilan keputusan itu diambil jika alternatif yang dipilih merupakan alternatif yang menjawab dari seluruh persoalan masalah yang sekarang dan yang akan datang. Tahapan dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara runtut dan sistematis berdasarkan permasalahan yang akan dihadapi. Hal ini dikarenakan setiap keputusan harus diambil dengan penuh pertimbangan serta keakuratan agar dapat menghindari dampak buruk. Pengambilan keputusan memiliki tiga proses tahapan yaitu 1) tahapan penyelidikan, 2) tahapan perancangan, dan 3) tahapan pemilihan. Pada tahapan penyelidikan dilakukan analisis kondisi lapangan yang berhubungan dengan keputusan yang diambil, tahapan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang bersifat mentah yang kemudian diolah dan diujikan agar mengetahui permasalahan yang dihadapi. Pada tahapan perancangan akan dilakukan proses pendataan, proses pengembangan dan proses penganalisisan tindakan atau keputusan yang akan diambil. Pada tahapan yang terakhir yaitu tahapan pemilihan akan dilakukan pemilihan keputusan dari beberapa keputusan yang ada dan yang paling logis. Tahapan ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pengambilan Keputusan Lokasi Pilot Project Kostratani

Program Kostratani melakukan tahapan ini salah satunya dalam proses penentuan lokasi *pilot project* Program Kostratani di Kota Semarang. Proses ini dapat dideskripsikan bahwa pada proses penyelidikan Kementerian Pertanian membentuk tim klasifikasi untuk menganalisis BPP yang paling memungkinkan untuk dijadikan sebagai *pilot project* Program Kostratani. Klasifikasi ini dilihat dari potensi wilayah, keaktifan BPP dalam menjalankan perannya, serta lokasi yang paling memungkinkan. Mulanya Dinas Pertanian Kota Semarang mengajukan dua BPP untuk dianalisis, dua BPP itu adalah BPP Kecamatan Ngaliyan-Mijen dan BPP Kecamatan Gunungpati. pada tahap perancangan tim klasifikasi BPP menilai dan mengukur BPP mana yang paling memungkinkan untuk dijadikan *pilot project*. Kemudian pada tahap pemilihan tim klasifikasi memilih BPP Kecamatan Gunungpati sebagai *pilot project* Program Kostratani mewakili Kota Semarang. Alasan pemilihan ini karena BPP Kecamatan Gunungpati merupakan BPP dengan potensi wilayah yang paling baik dan kompleks, memiliki 92 kelompok tani serta BPP yang berperan aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan perannya. Berdasarkan tahapan pengambilan keputusan, BPP Kecamatan Gunungpati merupakan keputusan yang tepat untuk dijadikan *pilot project*.

Koordinator BPP Kecamatan Gunungpati berpendapat, bahwa hadirnya kebijakan terkait Program Kostratani sudah tepat. Karena klasifikasi yang diperlukan dalam melakukan Program ini juga tepat sasaran. Seperti terdapat fasilitas listrik, jaringan internet, semangat dan keinginan penyuluh, serta adanya dukungan penuh dari Dinas Pertanian Kota Semarang. Menurut petugas BPP Kecamatan Gunungpati, hadirnya Program Kostratani adalah bentuk inovasi yang baik. Pemerintah pusat mempromosikan Program Kostratani dengan segala pembaharuan dan mekanisme yang ada, meskipun masih terdapat kekurangan didalamnya.

Sumberdaya yang Dilibatkan

Sumberdaya merupakan variabel penting dalam implementasi Program Kostratani. Sumberdaya ini dibedakan menjadi dua yaitu sumberdaya material dan non-material. Sumberdaya material adalah sumberdaya anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan sumberdaya sarana pra-sarana yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan implementasi kebijakan. Sedangkan sumberdaya non-material adalah sumberdaya manusia sebagai implementor kebijakan yang *capable* dan paham akan peran dan fungsinya. Berikut kondisi sumberdaya dalam pelaksanaan Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati.

Sumberdaya manusia pelaksana kebijakan Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati yaitu kepala camat, penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tanaman. BPP Kecamatan Gunungpati dibina oleh 5 PPL dengan 16 desa binaan. Artinya 1 penyuluh memiliki wilayah desa binaan kurang lebih sebanyak 3 sampai 4 desa.

Implementasi Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati saat penelitian sedang dilaksanakan kondisi secara global sedang mengalami pandemi Covid-19, sehingga anggaran dari pemerintah pusat yang semestinya disediakan untuk pelaksanaan Program Kostratani ditiadakan sementara untuk *refocusing* anggaran ke bidang kesehatan. Namun, penjelasan dari berbagai narasumber anggaran tetap disediakan namun tidak sebanyak jumlah yang dianggarkan oleh Kementerian Pertanian.

Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Kostratani adalah Personal Computer (PC), jaringan internet yang memadai, TV, webcam, kabel HDMI dan Drone untuk pemetaan koordinat lokasi lahan pertanian. Sarana prasarana pelaksanaan Program Kostratani telah terpenuhi sebagian seperti jaringan internet, TV, audio maupun PC *All in one*.

Faktor Penghambat Implementasi Program Kostratani di Wilayah Kerja BPP Gunungpati

Implementasi Program Kostratani bukan hanya berkaitan dengan mengubah pernyataan kebijakan kedalam sebuah tindakan ataupun aktivitas.

Setiap aktivitas implementasi akan selalu terdapat faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberlangsungan suatu kebijakan, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Karena disetiap faktor memiliki peranannya masing-masing dalam implementasi suatu kebijakan. Banyak hal yang mempengaruhi proses implementasi Program Kostratani, baik itu pengaruh standar kebijakan maupun sumber daya pendukung kebijakan. Berikut pemaparan mengenai beberapa faktor penghambat implementasi Program Kostratani di wilayah kerja BPP Kecamatan Gunungpati.

Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kostratani

Standar kebijakan adalah sebuah pernyataan dalam bentuk dokumen resmi yang menyatakan indikator keberhasilan Program Kostratani, sasaran, maksud dan tujuan dilaksanakan. Namun, sebaik apapun standar yang telah disusun sedemikian rupa dalam realisasi dilapangan tentu akan muncul hal yang tidak diharapkan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam implementasi Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati adalah terkendalanya pada kelengkapan dan kualitas data Simluhtan dan E-RDCK yang merupakan data pendukung terlaksananya Program Kostratani sehingga menyebabkan pelaksanaan Program Kostratani terhambat. Menurut paparan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa data yang dibutuhkan untuk sistem Program Kostratani adalah Simluhtan dan E-RDCK. Minimnya data yang tersedia dan kualitas data yang tidak sesuai dengan SOP pelaksanaan Program Kostratani membuat penyuluh perlu kembali melakukan *cross-check data* guna memperoleh data baku kostratani yang sesuai dengan kebutuhan.

Hambatan dalam Sumberdaya

Permasalahan dalam implementasi Program Kostratani adalah anggaran yang terhambat. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu faktor kebijakan dan kondisi global. Kondisi global yang dimaksud adalah pandemi Covid-19 yang merupakan kondisi darurat bagi seluruh negara, pandemi Covid-19 ini menjadi sumber permasalahan yang menghambat hampir seluruh agenda nasional. Pandemi Covid-19 membuat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Pandemi Covid-19

dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Instruksi Presiden ini menjelaskan tentang *refocusing* anggaran, relokasi kegiatan, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Permasalahan berikutnya implementasi Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati adalah minimnya jumlah personel penyuluh pertanian. Jumlah personel penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Gunungpati hanya berjumlah 5 orang yaitu 1 Koordinator BPP Kecamatan Gunungpati dan 4 anggota penyuluh pertanian. Minimnya jumlah personel ini sering dikeluhkan oleh penyuluh karena beban tugas yang ada, diperlukan personel tambahan untuk meringankan tugas-tugas lainnya. Minimnya jumlah personel ini juga berdampak pada etos kerja penyuluh, Selain itu perlu menambah personel yang khusus bertanggung jawab di bidang IT sekaligus menjadi admin BPP Kecamatan Gunungpati.

Hasil Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa capaian Program Kostratani dapat dilihat dari realisasi target yang sudah ditetapkan. Kegiatan dalam Program Kostratani semuanya terlaksana sesuai dengan timeline pelaksanaan rangkaian tahapan *pilot project* Program Kostratani. Berikut capaian realisasi Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati:

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa hampir semua kegiatan mencapai realisasi yang ditargetkan. Empat pokok agenda Program Kostratani merupakan rangkaian agenda yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati yang masih dalam tahapan *pilot project*. Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati terlaksana dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya terhambat sehingga target yang diharapkan tidak terpenuhi. Hal ini terjadi sebab adanya pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah melakukan improvisasi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Hasil kebijakan ditinjau dari aspek keberhasilan yang meliputi efisiensi dan efektivitas keberlangsungan BPP Kostratani di Kecamatan Gunungpati. Efisiensi Program Kostratani dapat ditinjau pada pelayanan BPP dalam pemenuhan data pertanian nasional, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan peran dan fungsi

BPP sebagai pusat data informasi, melalui peran penyuluh yang perlu melakukan update data pertanian setiap harinya sehingga melalui pemenuhan data pertanian di Indonesia yang terus update setiap hari maka perumusan program pembangunan pertanian akan menjadi lebih efisien, output yang dikeluarkan tentu akan lebih tepat guna, tepat sasaran serta memangkas proses yang panjang.

Tabel 4. Realisasi Agenda Program Kostratani di Kecamatan Gunungpati

No	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Sosialisasi mengenai isi dan substansi Program Kostratani	Penyuluh memahami isi dan substansi dari pelaksanaan Program Kostratani secara utuh	Penyuluh pertanian cukup kebingungan terhadap transformasi BPP Kostratani
2.	Pelatihan IT untuk meningkatkan kompetensi SDM BPP dalam menggunakan fasilitas IT (software dan hardware)	Kompetensi Penyuluh dalam menggunakan hardware (PC, Kamera, Audio) maupun software (Aplikasi pelaporan) meningkat	Pelatihan IT dinilai belum cukup meningkatkan kompetensi SDM terhadap pemanfaatan hardware maupun software, sebab masih banyak terkendala SDM.
3.	Pelatihan Aplikasi Pelaporan untuk meningkatkan pemahaman tata cara penggunaan aplikasi pelaporan penyuluh, metode input & submit data	Penyuluh memahami metode pengambilan data pertanian yang cepat dan tepat sehingga dapat memberikan laporan pertanian harian secara real-time	Penyuluh masih belum terbiasa dengan penambahan kerja berupa input data pertanian harian, sebab masih terbebani oleh tugas pokok penyuluh lainnya.
4.	Pemenuhan Fasilitas untuk mendukung keberlangsungan Program Kostratani	Fasilitas pendukung Program Kostratani terpenuhi pada BPP yang menjadi <i>pilot projet</i> Kostratani	Fasilitas yang diberikan tidak semua terpenuhi, sebab anggaran untuk Program ini terkena refocusing anggaran.

Sumber: Data Primer (diolah), 2021.

Hadirnya Program Kostratani dinilai memberikan kemudahan proses penginputan data pertanian, melalui kemudahan proses ini maka Program

Kostrarani dinilai memberikan pelayanan yang memudahkan publik memperoleh data pertanian nasional yang akurat.

Sedangkan dampak atau outcome yang diberikan dari terlaksananya Program Kostratani terbagi atas beberapa komponen yaitu; 1) pemerataan sarana prasarana pendukung terlaksananya Program Kostratani, 2) meningkatnya sistem yang terintegrasi untuk data pertanian nasional, 3) peningkatan fungsi dan peran penyuluh pertanian dalam mendukung terlaksananya Program Kostratani. Pemerataan sarana dan prasarana pendukung terlaksananya program dilihat pada pemenuhan fasilitas pendukung seperti adanya pendukung jaringan internet di BPP Kecamatan Gunungpati. Selain itu juga adanya penyediaan sarana pendukung pelatihan penyuluh dan petani berupa televisi untuk mendukung pelatihan online yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian yang meliputi Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian (MSPP), Pelatihan sejuta petani dan penyuluh, Ngobrol Asik (Ngobras) dan mendukung agenda meeting online lainnya. Dampak pada data pertanian yaitu meningkatnya integrasi data pertanian nasional. Data pertanian yang sebelumnya masih terdapat perbedaan antara data kecamatan, data provinsi dan data nasional kini semuanya lebih tertata dengan adanya proses verifikasi data pertanian yang meliputi data kelembagaan petani di Kecamatan. Data ini yang semulanya hanya data kelompok kini data koordinat lahan disertakan sebagai bentuk transformasi BPP Kostratani dengan memberikan tambahan kolom koordinat disetiap lahan sawah yang dikelola oleh petani.

Peningkatan fungsi dan peran penyuluh ditunjukkan pada terlaksananya fungsi dan peran BPP Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati. Fungsi dan peran BPP Kostratani yaitu 1) Pusat data dan informasi, peran ini ditunjukkan dengan peningkatan kualitas data pertanian yang menjadi lebih akurat dengan adanya update yang dilakukan setiap hari; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian, peran ini ditunjukkan dengan adanya pemenuhan fasilitas pendukung pertanian yaitu teknologi pertanian seperti media tanam rice transplanter sebagai alat bantu penanaman bibit padi; 3) Pusat pembelajaran, peran ini ditunjukkan dengan adanya agenda Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian (MSPP) yang dilakukan satu kali seminggu dengan materi yang beragam serta adanya

pelatihan sejuta petani dan penyuluh; 4) Pusat konsultasi agribisnis, peran ini ditunjukkan dengan aktifnya BPP Kecamatan Gunungpati dalam menerima keluhan dari petani dan memberikan bantuan konsultasi yang dilakukan secara verbal maupun praktek langsung; 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan, peran ini ditunjukkan dengan penyediaan informasi pasar dan jalinan mitra petani yang dihubungkan oleh penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Gunungpati.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan dan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Kostratani di Wilayah Kerja BPP Kecamatan Gunungpati dinilai cukup baik namun perlu banyak perbaikan, baik itu perbaikan untuk pelaksana maupun standar operasional pelaksanaan Program Kostratani. Pelaksanaan Program Kostratani masih terdapat beberapa permasalahan baik itu masalah teknis maupun yang non-teknis. Permasalahan teknis meliputi ketersediaan sarana prasarana pendukung Program Kostratani yang masih terbatas, sedangkan untuk permasalahan non-teknis berkaitan dengan kesiapan dan jumlah sumberdaya manusia pelaksana Program Kostratani.

Rekomendasi Kebijakan

Saran yang dapat diberikan pada BPP Kecamatan Gunungpati dalam mendukung transformasi BPP Kostratani yaitu pelaksana Kostratani perlu disesuaikan lagi dengan menambah SDM khusus bidang IT agar dapat membantu memudahkan proses pengoperasian setiap fasilitas yang diberikan untuk mendukung Program Kostratani, selain itu pemanfaatan teknologi yang dapat terintegrasi oleh seluruh personel untuk mempermudah distribusi data pertanian dan mempermudah submit data baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiwodo. (2021). Digitalisasi Pertanian Dan Peran Bank Negara Indonesia Dalam Ketahanan Pangan Paska Adaptasi Kebiasaan Baru. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(3), 227-243.
- Braun & Clarke. (2006). Using Thematic Analysis In Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-104.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Dayat, D. (2017). Persepsi Penyuluh Pertanian dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 12(1), 27-39.
<https://doi.org/10.51852/jpp.v12i1.339>
- Khomzi, I.R., Handono, S.Y. and Trianawati, A. (2019). Sinergisitas *Stakeholder* Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang. *Agribusiness Journal*, 13(2), 25-35.
<https://doi.org/10.15408/aj.v13i2.13948>
- Mahardi, S., Kuncoro, M.A. And Siswanto, A. (2020). Integrasi Data Sektoral Pemerintah. In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (Sainteks)*, 1 (1), 615-617.
- Nuryati, L. (2020). Peningkatan Layanan Penyuluhan Pertanian Dalam Rangka Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sebagai Pusat Kegiatan Pembangunan Pertanian Di Kecamatan (Kostratani).
<http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/11482>
- Pramono, J. And Kinasih, W. (2019). Sinergitas Antar *Stakeholder* Dalam Penyelenggaraan Kamtibmas Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Research Fair Unisri*, 3(1), 298-309.
<https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2589>
- Setiana, L., Nuskhil, M. And Hidayat, S. (2021). Kompetensi Penyuluh Pertanian Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Pertanian Modern. In *Prosiding Seminar Teknologi Agribisnis Peternakan (Stap) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman*, 8(1), 602-607.
<http://jnp.fapet.unsoed.ac.id/index.php/psv/article/view/1225>